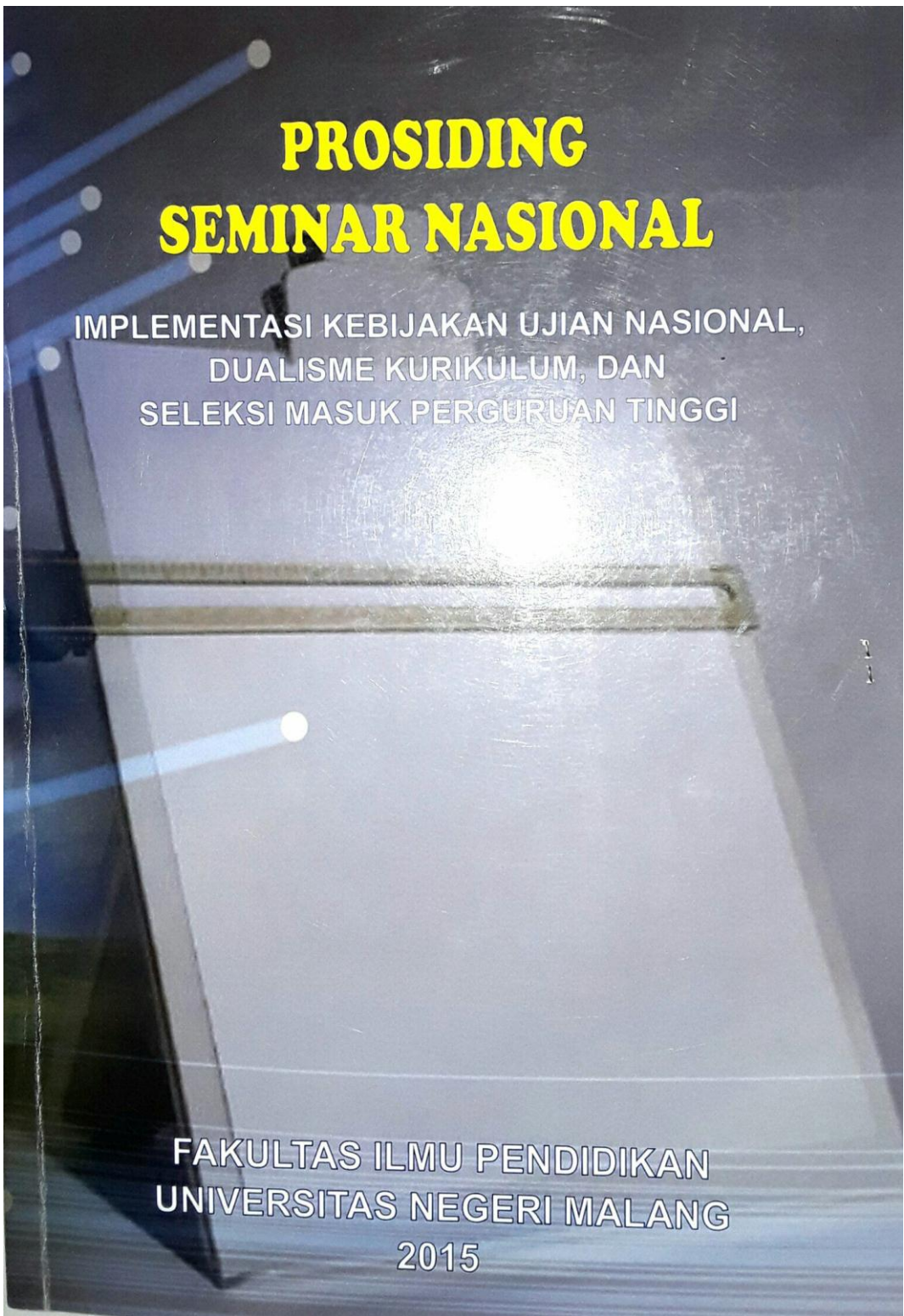




PROSIDING SEMINAR NASIONAL

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL,
DUALISME KURIKULUM, DAN
SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2015



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN



SERTIFIKAT

Nomor: 15.5.1/UN32/TU/2015

diberikan kepada

Dr. Asep Sunandar, S.Pd., M.AP.
Jurusan AP FIP UM

atas partisipasinya sebagai

PEMAKALAH

Seminar Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan

dengan tema:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL, DUALISME KURIKULUM, DAN
SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI**

Tanggal 15–16 Mei 2015

di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,

Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.
NIP 19640312 199001 1 001

xii, 486 hlm; 29,7 cm

Ketua Penyunting	:	Sopingi
Penyunting	:	Juharyanto
Pelaksana	:	Diniy Hidayatur Rahman
Penyunting Ahli	:	Hardika
		Maisyaroh
		Dedy Kuswandi
Pelaksana	:	Syahidul Haq

Layout : Agus Dwi Irawan K.
Cover Design : Agus Nurkhalimi

Undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Dicetak oleh : Universitas Negeri Malang

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang, Kode Pos 65145
Telp. (0341) 551312

15.	Memfasilitasi Analisis Cerita Sejarah dengan Strategi Pembelajaran Argumentasi: Suatu Cara untuk Mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada Matapelajaran Sejarah Indonesia di SMA <i>Susanto Yusuf Alfian</i>	98–103
16.	Penerapan <i>Mind Mapping</i> dalam Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Saintifik di Sekolah Dasar <i>Sri Sugiharti</i>	104–111
17.	Pengembangan Kurikulum Pondok Pesantren Berbasis Kurikulum 2013 <i>Juharyanto</i>	120–130
18.	Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk Menunjang Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Berbasis Kurikulum 2013 <i>Murtiningsih</i>	131–137
19.	Desain dan Pengembangan Perangkat Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 serta Kendala Implementasinya Kini <i>Agus Wedi</i>	138–142
20.	Kronika Ujian Nasional, Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, dan Kurikulum 2013 <i>Supriyono</i>	143–155
21.	Pelemahan Fungsi Ujian Nasional Merupakan Pelemahan Daya Saing Anak Bangsa dalam Menghadapi Globalisasi <i>Muchtar</i>	156–162
22.	Kebijakan Pendidikan dan Aplikasinya dalam Ujian Nasional <i>Computer Based Test (CBT)</i> <i>Sunarni</i>	163–172
23.	Ujian Nasional Mata Pelajaran Bahasa Inggris Ditinjau dari Perspektif Dualisme Kurikulum <i>Hernina Dewi Lestari dan Intan Kusumawardhani</i>	173–177
24.	Menakar Implementasi Ujian Nasional dalam Perspektif Pendidikan yang Memanusiakan Manusia <i>Edi Widiyanto</i>	178–184
25.	Sekolah Versus LBB: Strategi Penyiapan Peserta Didik Mengikuti Ujian Sekolah (US)/Ujian Nasional (UN) <i>Achmad Supriyanto</i>	185–190
26.	Manajemen Ujian Nasional yang Efektif, Efisien, Menumbuhkan Karakter dan Meningkatkan Mutu Pendidikan <i>Ali Nurhadi</i>	191–198
27.	Kaleidoskop Permasalahan Seputar Ujian Nasional <i>Asep Sunandar</i>	199–204
28.	Penerapan <i>Mind Map</i> dalam Menghadapi Permasalahan Persiapan Ujian Nasional di Tingkat Sekolah Dasar <i>Sukamti</i>	205–209
29.	Peran Guru Pembimbing dalam Implementasi Kurikulum 2013 <i>Mamik Srimulyani</i>	210–213

KALEDOSKOP PERMASALAHAN SEPUTAR UJIAN NASIONAL

Asep Sunandar

Jurusan Administrasi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
asep.sunandar.fip@um.ac.id/asepsun@gmail.com

Abstrak

Ujian Nasional selalu menjadi trend topic dalam setiap pelaksanaannya, bukan karena proses pelaksanaannya yang serentak di seluruh Indonesia namun bumbu-bumbu kecurangan seputar pelaksanaan UN selalu menarik untuk dibahas. Analisis terhadap pelaksanaan UN dilakukan pada setiap tahun pelaksanaan UN mengingat setiap tahun selalu ada perbedaan kebijakan yang dilaksanakan. Kaledoskop permasalahan seputar UN mencoba untuk memotret permasalahan-permasalahan yang terjadi setiap pelaksanaan UN dengan tujuan untuk pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil analisa pelaksanaan UN menggambarkan bahwa UN memiliki peran strategis dalam pengembangan kualitas layanan dan output pendidikan. Hasil ujian ini harus ditindaklanjuti dengan kebijakan lainnya sehingga instansi pendidikan dapat memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Proses ujian nasional harus diselaraskan dengan esensi evaluasi pendidikan yang bukan hanya menilai hasil belajar siswa namun juga menilai perkembangan intelektual dan perilaku siswa. Pelaksanaan ujian nasional yang sudah beralih dari penentu kelulusan menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan pendidikan mengharuskan pengambil kebijakan bidang pendidikan untuk menjadikan hasil UN sebagai data dasar dalam memperbaiki layanan pendidikan secara nasional.

Kata Kunci: ujian nasional, layanan pendidikan, kaledoskop permasalahan UN

KEMELUT UN

Pelaksanaan ujian nasional (UN) telah berlangsung sejak tahun 2002, dalam setiap pelaksanaannya selalu saja melahirkan perdebatan sengit antara para pemerhati pendidikan dan praktisi pendidikan dengan pemerintah sebagai penggagas dan pelaksana ujian nasional. Satu hal yang perdebatan sengit adalah dijadikannya hasil UN sebagai tolok ukur dalam menentukan kelulusan siswa.

Pemerintah sering berargumentasi bahwa UN merupakan alat ukur untuk mengontrol kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan kita yang jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Korea Selatan mengharuskan kita untuk memacu kualitas agar tidak tertinggal jauh. Secara umum semua pakar pendidikan yang sering berkomentar di media massa menyetujui bahwa UN merupakan alat ukur untuk melihat pemerataan kualitas pendidikan. Namun celakanya, pemerintah menempatkan UN selain sebagai alat pengontrol juga dijadikan alat untuk menekan kualitas tersebut. Rupanya birokrat bangsa ini belum bisa keluar dari mentalitas penjajah yang selalu menerapkan metode represif dalam mencapai suatu tujuan.

Bangsa ini sering terjebak dalam pemikiran instan yang tidak mau memikirkan proses karena dipandang rumit dan memakan waktu cukup panjang. Para siswa cukup dilatih mengerjakan berbagai soal dan diharapkan dapat langsung meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti halnya Timnas Sepak bola Indonesia, walaupun sudah berlatih ke Argentina tetap saja hasilnya *jeblog*. Jangankan sampai tingkat dunia di kawasan Asia Tenggara saja kalah terus. Dua fenomena ini merupakan imbas dari pemikiran instan, tidak mau susah payah membentuk dari awal dengan proses pendidikan dan pelatihan yang terencana dan terstruktur.

Prof. Dr. Muhammad Surya (PR, 12 November 2007) memberikan wejangan bahwa UN sebagai suatu program yang telah dirancang sebagai satu kebijakan nasional harus disikapi secara tepat. Pelaksanaan UN harus disikapi secara positif dan bukan negatif, secara objektif dan bukan subjektif, secara holistik dan bukan sempalan, secara konsepsional dan bukan coba-coba, secara rasional dan bukan emosional, secara pedagogis dan bukan birokratis, apalagi politis.

Apabila dikembalikan kepada *Khitah* UN sebenarnya penulis ingin bertanya sebetulnya apa yang ingin dicapai dari pendidikan Indonesia, apakah siswa yang selalu bernilai sepuluh atau siswa yang memiliki kedewasaan berpikir. Kita kadang ambigu, disatu sisi pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, kurikulum diubah disesuaikan dengan *trend* yang menunjukkan keberpihakannya terhadap pendidikan yang memanusiakan manusia. Konsep kurikulum berbasis kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan perwujudan dari pendidikan yang diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik. Tetapi di sisi lain pada saat melihat hasil pendidikan kita yang menunjukkan kualitasnya jauh di bawah negara tetangga, pemerintah kita dengan berbagai upaya mempertahankan bahkan memaksakan agar pendidikan dievaluasi jauh dari makna pendidikan yang memanusiakan manusia.

Inilah fenomena yang terjadi. Problematika dunia pendidikan kita seolah-olah tak pernah surut. Kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dengan landasan filosofis pendidikan mejadi perdebatan yang tidak pernah habis sehingga tenaga dan pemikiran ini menjadi menguap kelelahan hanya untuk berdebat, tindakannya tidak ada. Akhirnya, ya terpuruk dan terpuruklah rapot yang selalu diperoleh bangsa Indonesia dalam evaluasi *human development indeks*.

A. Menyoal Independensi Tim Pemantau UN

Keberadaan Tim Pemantau Independen memang sangat dibutuhkan ditengah pelaksanaan UN yang selalu mengundang kontroversi. Kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN seperti bocornya soal, kasus guru yang memberikan kunci jawaban, upaya birokrasi pendidikan yang berusaha

meluluskan semua siswa yang ada diwilayah kerjanya dengan berbagai cara dan lain sebagainya. Diakui atau tidak hasil UN mempunyai dampak politis terhadap jabatan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan bahkan terhadap posisi kepala daerah sekalipun. Mengingat dampaknya yang begitu besar maka tidak heran pelaksanaan UN 2007 akan diikuti oleh trik-trik bahkan strategi-strategi kotor dari berbagai pihak yang berkepentingan agar pelaksanaan UN di daerahnya sukses yang ditandai dengan lulusnya semua peserta UN.

Independensi Tim

Kebijakan departemen pendidikan nasional menunjuk instansi pemerintah yang lain sebagai Tim Pemantau Independen UN perlu dikritisi, Tim Pemantau Independen seharusnya benar-benar independen terbebas dari keterkaitan berbagai hubungan birokrasi. Tim Pemantau Independen hendaknya dibentuk oleh lembaga diluar pemerintah dan diisi oleh orang-orang non-pemerintah. Kalau Tim Pemantau Independen masih dibentuk oleh pemerintah bahkan yang mengisinya masih pekerja pemerintah (dosen) maka independesinya betul-betul sangat perlu dipertanyakan. Memperhatikan Permendiknas No. 20 tahun 2005 tentang kriteria unsur independen yang terdiri 1). Dosen dan/atau mahasiswa dari PTN yang direkomendasikan oleh pimpinan PTN yang bersangkutan, 2). Bagi daerah yang tidak memiliki PTN dapat memanfaatkan PTS yang terakreditasi, 3). Bagi daerah yang tidak memiliki PTN atau PTS dapat memanfaatkan anggota organisasi profesi pendidikan non guru (ISPI, ASOSIASI BKI, atau organisasi profesi sejenis) yang direkomendasikan oleh pimpinan asosiasi yang bersangkutan, 4). Bagi daerah yang tidak memiliki PTN, PTS atau organisasi profesi dapat memanfaatkan perangkat kecamatan yang direkomendasikan oleh camat.

Penulis memandang keberadaan Tim Pemantau Independen dari ke empat unsur tersebut akan mengakibatkan kerja yang ewuh pakewuh, bagi kalangan yang kontra UN hal ini menjadi sindiran segar siapa yang memantau dan siapa yang dipantau sama saja. "independen seperti apa dan independen untuk siapa". Terlebih apabila biaya yang digunakan Tim Pemantau Independen berasal dari pemerintah.

Penulis berpandangan keindependenan Tim Pemantau Independen UN ini sangat diragukan. Jangan-jangan mereka hanya dijadikan legitimasi dan alat untuk

mengkanter temuan kecurangan UN yang ditemukan masyarakat. Seperti pengalaman tahun sebelumnya, temuan-temuan kecurangan yang ditemukan masyarakat banyak dimentahkan oleh Tim Pemantau Independen. Hal ini disinyalir karena tim pemantaunya tidak memiliki keberpihakan kepada kebenaran. Padahal seharusnya antara Tim Pemantau Independen baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat dapat bekerjasama dan saling mengisi kekurangan. Bukannya menjadi rival antara satu dengan lainnya. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi bahkan hingga terulang kembali maka akan menjadi preseden buruk yang mengakibatkan lahirnya berbagai permasalahan baru seputar pelaksanaan UN 2007.

B. CUL-DE-SAC dan Wanprestasi Ujian Nasional

Judul tulisan ini jika dicermati memang sangat membingungkan, tentunya sebingung pikiran orang tua siswa SMA yang baru saja putra-putrinya mengikuti ujian nasional mata pelajaran Bahasa Inggris. Sepulang dari kampus penulis dicurhati keponakan tentang ujian Bahasa Inggris yang baru saja diikutinya. Ujian Bahasa Inggris SMA dibagi kedalam dua kategori *reading* sebanyak 35 soal dan *listening* 15 soal, kasus yang terjadi di Kota Malang dan bahkan menurut info beberapa teman terjadi se-Jawa Timur *conversation* yang diperdengarkan tidak sesuai dengan naskah soal yang diterima siswa. Kejadian tersebut sontak menimbulkan kegaduhan dan bahkan kecemasan para siswa dan orang tua yang menerima berita tersebut. Walaupun UN tahun ini tidak menentukan kelulusan namun untuk mengikuti pendidikan tinggi hasil ujian nasional bisa menjadi prasyarat seorang calon mahasiswa.

Sebagai upaya mencari jawaban atas peristiwa tersebut, penulis mengontak salah seorang pejabat tinggi Kemdikbud melalui Whatsapp dengan maksud untuk menanyakan bagaimana kebijakan Kemdikbud. Jawaban beliau “Hal itu selalu terjadi hampir setiap tahun walaupun sudah dengan persiapan yang matang. Biasanya kebijakan kami menguntungkan siswa”. Tidak lama setelah komunikasi tersebut saya membuka situs Kemdikbud, diperoleh penjelasan hasil *press converence* Mendikbud yang menyatakan “komponen *listening* agar tidak merugikan siswa tidak dipakai CDnya, dan tidak diperhitungkan dalam penilaian”.

Sepintas jawaban Bapak Anies Baswedan cukup menyejukan hati, namun pikiran saya coba menelusuri kalau siswa tersebut pandainya dalam kemampuan *listening* tentu siswa tersebut sangat dirugikan, kemudian pada saat seorang siswa mendapat nilai 10 karena mampu menjawab 35 soal *reading* lalu dia dinyatakan sebagai siswa yang pandai berbahasa Inggris. Parameter itu menjadi tidak valid karena siswa hanya mengikuti ujian *reading*. Dan yang paling menggelikan mengapa masalah tersebut hanya terjadi di Provinsi Jawa Timur, jika menelaah penjelasan Mendikbud yang menjelaskan sumber masalahnya “Jadi tidak *mix and match*. Perusahaannya berbeda. Perusahaan yang menyiapkan CD dan kertas tidak sama” jikalau perusahaannya berbeda mengapa kasus tersebut hanya terjadi di Jawa Timur.

Jawaban-jawaban salah seorang direktur dan menteri di atas pada dasarnya menggambarkan sebuah kebrok-brokkan yang hingga kini masih terjadi dalam pelaksanaan ujian nasional. Mohon maaf, harus dicatat bahwa ujian nasional menyedot uang rakyat puluhan milyar. Konteks ini juga sangat berhubungan dengan masa depan seorang anak bangsa, dimana kesalahan yang terjadi bisa berimplikasi pada anak-anak di masa depan.

Mohon dipikirkan mengapa kita pada saat melakukan kesalahan selalu mencari kambing hitam, teringat apa yang selalu dikatakan seorang ibu jika anaknya jatuh “aduh ko jatuh? kodoknya nakal ya nak, ayo kita pukul kodoknya” padahal ditempat jatuhnya anak tersebut tidak ada kodok. Pemerintah sebaiknya jika ingin melaksanakan ujian nasional yang jujur yang harus jujur juga mengatakan bahwa SDM yang ada di Kemdikbud tidak mumpuni untuk melaksanakan ujian nasional, karena masalah teknis dalam ujian nasional selalu saja terjadi. Tahun lalu tentu kita masih ingat kasus kurangnya soal dan lembar jawaban ujian nasional, hingga akhirnya panitia UN sekolah memphoto copy soal ujian. Kambing hitam ujian nasional tahun lalu juga sama yaitu seputar tender dan perusahaan percetakan.

Reposisi Struktur

Kemendikbud merupakan salah satu kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur akibat dipecahnya Direktorat Pendidikan Tinggi ke dalam

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Namun sejauh ini Mendikbud belum melakukan restrukturisasi dan bahkan mengisi beberapa jabatan yang masih kosong. Usia pemerintahan Presiden Jokowi sudah memasuki bulan ke tujuh, maka sudah sewajarnya apabila segera dilakukan perombakan struktur di lingkungan Kemdikbud.

Jika di analogikan SDM Kemdikbud layaknya sebuah mesin tua yang didorong dengan system baru, walaupun dorongannya sangat kencang namun karena onderdil mesinnya sudah memasuki periode usang maka mesin tidak akan mampu memproduksi sesuai dengan keinginan system baru. Sepengetahuan penulis masih banyak PNS Kemdikbud yang mentalnya ‘asal gugur kewajiban’, belum begitu banyak pegawai yang berinisiatif untuk mengembangkan organisasi dengan berbagai inovasi.

Terkhusus dalam proses pelaksanaan Ujian Nasional yang hanya ditangani oleh tim ad hoc yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap menteri, sehingga tidak memiliki independensi dan ketegasan dalam melaksanakan proses UN. Kegiatan UN merupakan agenda besar dan menyedot biaya yang sangat tinggi maka sudah sewajarnya apabila kegiatan tersebut ditangani oleh tim independen yang memiliki kemandirian mutlak. UN berkenaan dengan kerahasiaan negara untuk itu maka penyelenggaranya harus independen terlepas dari intervensi. UN juga menjunjung tinggi kejujuran dan objektivitas maka sangat wajar apabila penilaian hasil UN harus terbebas dari keinginan sejumlah pihak.

Ending dari tulisan ini kami tentu sangat berharap Kemdikbud jujur mengakui kesalahan dan kekurangan kualitas SDM yang mampu menyelenggarakan ujian nasional tanpa kesalahan yang fatal. Untuk menghasilkan siswa yang berkarakter sebaiknya pelaksanaan ujiannya juga dilakukan dengan jujur tanpa intervensi dan dipersiapkan dengan matang. System pendidikan harus dikuatkan dengan manajemen dan personalia yang baik, hingga terhindari dari cul de sac atau kebuntuan akibat kegagalan yang selalu diperoleh pada setiap tahunnya. Permasalahan ujian nasional yang selalu terjadi setiap tahun juga merupakan sebuah wanprestasi dari pemerintah dalam bidang pendidikan. Padahal

seperti kita ketahui anggaran yang digelontorkan untuk penyelenggaraan pendidikan bukan uang yang sedikit.

Kejadian tersebut harus menjadi cambuk bagi Mendikbud yang baru menjabat kurang dari satu tahun, cermati kapasitas dan kapabilitas para pejabat yang ada di lingkungan Kemdikbud, segera lakukan langkah tegas untuk menempatkan orang yang betul-betul mampu bekerja dengan optimal. Jangan tersandera oleh system atau orang yang hanya ingin menguntungkan sebagian pihak apalagi dirinya sendiri.

C. Evaluasi yang Mendidik

Evaluasi merupakan sebuah upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangberhasilan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Evaluasi tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan. Dalam berbagai pandangan aliran pendidikan evaluasi merupakan alat yang dapat menggambarkan tingkat keefektivan dari suatu metode yang diterapkan.

Pada pelaksanaannya, evaluasi sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan karena implikasi dari evaluasi tersebut adalah lulus dan tidaknya seseorang yang mengikuti proses pendidikan. Fungsi evaluasi dipandang sangat sempit sehingga pada akhirnya membentuk pemahaman yang keliru tentang evaluasi. Orang menjadi apatis dan cenderung menghindari sesuatu hal yang berbau evaluasi. Apa sebetulnya fungsi evaluasi, Dananjaya (2005) memberikan penjelasan bahwa evaluasi belajar yang baik paling tidak memiliki dua fungsi, yaitu memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar dan mengetahui kemajuan belajar siswa.

Evaluasi yang berfungsi memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar dapat dimaknai sebagai *feedback* dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung guna memperbaiki kurang atau ketidaksempurnaan pembelajaran. Fungsi evaluasi minimal dimanfaatkan oleh dua komponen pendidikan, yaitu guru dan birokrasi pendidikan. Guru khususnya dapat memperbaiki proses belajar mengajar atau meningkatkan mutu dengan cara mengamati, menganalisa dan mengambil kesimpulan dari evaluasi belajar atau ulangan. Sementara aparat dinas

pendidikan dan kepala sekolah dapat mendistribusikan faktor hambatan dan dorongan keberhasilan. Aparat dinas pendidikan juga memikirkan peningkatan mutu akademik seluruh sekolah, berdasarkan rata-rata nilai tiap mata pelajaran tiap kelas sebagai umpan balik.

Fungsi evaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, gunanya agar guru atau kepala sekolah dapat memberikan perhatian secara individual kepada siswa. Siswa yang berprestasi baik mendapat penghargaan agar dapat menumbuhkan rasa bangga dan kepercayaan diri, sementara siswa yang ternyata berprestasi akademik kurang akan mendapatkan perhatian khusus. Guru harus berusaha mencari sebab dan memberi motivasi agar siswa berprestasi lebih baik.

Proses evaluasi ditujukan untuk memperoleh gambaran hasil pembelajaran yang dilakukan. Baik dan buruknya hasil yang diperoleh merupakan cerminan dari proses yang dilaksanakan. Hal itu hendaknya disikapi dengan dewasa oleh berbagai komponen yang berkaitan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa hasil yang diperoleh harus semuanya baik karena kecerdasan dan kemampuan siswa itu pasti bervariasi dan bersifat *mozaik*.

Apakah UN kita yang selama ini dilaksanakan dan dipertahankan dengan berbagai argumentasi termasuk evaluasi yang mendidik ? Apakah siswa merasa *enjoy* dalam mengikuti UN ? Apakah para guru dan birokrasi pendidikan mampu mengambil pelajaran dari *feedback* hasil UN ? Evaluasi hendaknya bersifat mendidik bukan menghakimi. Evaluasi sebagai suatu upaya untuk memotret hasil dari proses pendidikan harus dikemas semenarik mungkin agar jauh dari kesan seram dan menakutkan. Orang yang menjalani proses evaluasi harus merasa *enjoy*, tidak menanggung beban dan tidak merasa tertekan. Ini adalah pekerjaan rumah bersama para pemikir pendidikan dan praktisi pendidikan untuk merumuskan model evaluasi yang dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak berimbas psikologis kepada siswa yang mengikutinya.

Ujian Standardisasi Kualitas Pendidikan

Belajar dari sistem evaluasi yang dilakukan di negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat bahkan Malaysia sekalipun, evaluasi yang dilakukan di ketiga negara tersebut ditujukan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai dan kendala yang ditemui. Menurut pemaparan seorang teman yang sempat

mengenyam ilmu di negeri Elisabet, evaluasi yang dilakukan pemerintah Inggris tidak ditujukan untuk menentukan kelulusan siswa, evaluasi tidak menjadi beban psikologis baik bagi siswa dan guru. Hasil evaluasi segera ditindaklanjuti dengan perbaikan di berbagai hal yang kiranya dipandang sebagai suatu kelemahan dalam proses pembelajaran.

Memperhatikan kondisi yang terjadi penulis mengajukan sebuah gagasan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik yang tidak dikaitkan dengan kelulusan siswa. Ujian harus benar-benar dijadikan alat untuk memonitor hasil belajar. Ada sebuah pandangan dari penulis kalau hasil belajar masih dievaluasi dengan UN hanya siswalah yang dituntut untuk belajar lebih rajin. Kita sering mendengar komentar pejabat yang menyatakan bahwa penetapan nilai batas kelulusan merupakan upaya untuk memacu semangat siswa belajar. Padahal yang terjadi sebaliknya, bukan menjadi pemacu malah menjadi beban siswa. Tuntutan perbaikan hendaknya dilakukan terlebih dahulu oleh perangkat pendidikan. Kalau perangkat pendidikan berkualitas (guru, sarana dan prasarana) secara otomatis akan mendorong siswa untuk turut pula lebih rajin memacu dirinya guna meraih prestasi lebih tinggi.

Penulis mengajukan usul agar sistem evaluasi dengan UN sudah selayaknya diganti dengan model ujian lain. Penulis memandang model ujian yang diterapkan kepada siswa Indonesia hendaknya dijauhkan dari sesuatu hal yang berdampak tekanan mental. Banyak kejadian sejak UN diberlakukan, misalnya terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa yang tidak lulus seperti pembakaran sekolah, mabuk-mabukan, bahkan hingga bunuh diri.

Manurut pandangan penulis, ujian yang cocok bagi pelajar Indonesia haruslah ujian yang bersifat memantau kemajuan dan kelemahan pembelajaran bukan hasil pembelajarannya. Istilah yang penulis ajukan adalah Ujian Standardisasi Kualitas Pendidikan. Hasil ujian tidak ditunjukkan dengan angka-angka melainkan dideskripsikan. Soal tidak berbentuk pilihan ganda tetapi bersifat uraian, misalnya dalam mata pelajaran matematika kompetensi pemahaman rumus pitagoras, kalau ternyata siswa tidak mampu memahami dan mengoperasionalkan rumus tersebut diberikan keterangan bahwa siswa belum mampu menguasai kompetensi pitagoras.

Hasil ujian ini juga dapat digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, misalnya siswa SD yang mau melanjutkan ke SMP. Terdapat beberapa kriteria bahwa untuk masuk SMP pada mata pelajaran matematik harus sudah menguasai rumus persamaan, logaritma, bujur sangkar dan lain sebagainya. Dengan model penerapan seperti itu tidak ada lagi beban mental harus meraih nilai tinggi. Kemampuan yang harus dimiliki siswa menjadi jelas yakni untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya siswa harus menguasai kemampuan ini dan itu yang sudah terdeskripsikan dengan jelas.

D. Kesimpulan

Kaledoskop permasalahan seputar UN merupakan analisa terhadap permasalahan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada setiap pelaksanaan UN. Analisa dilakukan untuk menemukan inti permasalahan dan ide pokok sebagai solusi atas permasalahan UN di tahun sebelumnya. Permasalahan seputar UN selalu muncul walaupun dengan jenis dan vareasi yang berbeda-beda. Permasalahan seputar UN bukanlah masalah biasa, permasalahan yang muncul harus menjadi input kebijakan untuk mereumuskan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan UN.

Tim pemantau independen UN memiliki peran bukan sebagai auditor kebocoran tetapi berperan sebagai auditor ketepatan pelaksanaan UN agar tidak bertentangan dengan esensi pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa. Esensi ide pokok tim pemantau pada dasarnya masih aplikatif dan dibutuhkan pada setiap pelaksanaan UN, hanya saja komposisi dan jabaran pekerjaan tim pemantau harus disusun secara spesifik.

Upaya perbaikan pelaksanaan UN bukan hanya bersifat parsial dan sebagian-sebagian, UN yang selama ini dilaksanakan oleh tim adhock hendaknya dirubah. Pelaksana UN sewajarnya ditetapkan dikelola oleh suatu lembaga tersendiri, sehingga pelaksanaan UN dlaksanakan lebih objektif dan terhindar dari kepentingan-kepentingan praktis.

UN memiliki implikasi terhadap kebijakan dan perbaikan layanan pendidikan secara nasional. Pelaksanaan UN sewajarnya tidak bertentangan dengan filosofi kurikulum yang mengarah kepada pandangan konstruktivistik.

Pelaksanaan ujian tidak hanya mengukur kemampuan siswa tetapi mengembangkan kemampuan siswa. System evaluasi tidak hanya pada aspek kognitif melainkan hingga pada aspek afektif dan psikomotorik.

Daftar Pustaka

Caldwell, B.J & Spinks, J.M. 1992. *Leading the Self-Managing schools*. Bristol, PA. : The Palmer Press.

Dananjaya, U. 2005. *Potret Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pribadi.

Good, Carter V. (ed) 1959. *Dictionary of Education*. New York. McGraw-Hill Book Company.

Gorton, R.A. 1976. *School Administration*. Dubuque, IO : WM C. Brown Co.

Haimann, Theo, Scott, William G, & Connor, Patrick E. 1978. *Managing the Modern Organization*. 3rd eds. Boston : Houghton Mifflin Company.

Hostrop, R.W. 1983. *Managing Education for Results*. Palm Strings, PL : ETC Publishing.

Surya, M. 2007. Menyikapi UN. (PR, 12 November 2007).